



PEMENUHAN HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN PASIR JAMBAK DI KELURAHAN PASIA NAN TIGO KOTA PADANG

Ratna Sari¹ , Deded Chandra²

Program Studi Pendidikan Geografi, FIS, Universitas Negeri Padang

Email: Ratnaasarii93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pemenuhan hak ekonomi sosial budaya masyarakat nelayan Pasir Jambak di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*. Teknik pengolahan data ditentukan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengatakan (a) Pemenuhan hak ekonomi sosial budaya masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap pendidikan dari segi ketersediaan lembaga formal yang ada masih terdapat kekurangan yaitu tingkat SMA, sedangkan dari fasilitas sekolah sudah memadai. (b) Pemenuhan hak ekonomi sosial budaya masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap perumahan yang layak dari segi kondisi perumahan masyarakat nelayan masih belum layak dari kondisi fisik, perumahan masyarakat nelayan belum terpenuhi atas kelayakan rumah sehat. Artinya masih terdapat rumah masyarakat nelayan yang belum memiliki WC, masih memanfaatkan MCK, dan perumahan masyarakat nelayan belum aman. Artinya masih terdapat rumah masyarakat yang dekat di pinggir pantai, dan banjir apabila hujan lebat.

Kata kunci— Pemenuhan Hak, Ekonomi Sosial Budaya, dan Masyarakat Nelayan.

ABSTRACT

This study aims to describe how to fulfil the socio-cultural economic rights of the fishing community of Pasir Jambak in Pasia Nan Tigo Village, Padang City. This type research is a qualitative. Informants this study were determined by purposive sampling. Data collection techniques used in the form of observation, interviews and documentation. Research results say (a) The fulfillment of socio-cultural economic rights of the fishing community is related to the fulfillment of education in terms of the availability of existing formal institutions, namely the high school level, while the school facilities are adequate. (b) The fulfillment of the socio-cultural economic rights of the fishing community related to the fulfillment of proper housing in terms of housing conditions for the fishing community is still not feasible from the physical condition, the housing for the fishing community has not been fulfilled on the feasibility of a healthy house. This means that there are still fishing community houses that do not have toilets, still use MCK, and fishing community housing is not safe. This means that there are still people's houses near the beach, and flooding when it rains heavily.

Keywords— *Fulfillment, Socio-Cultural Economy, and Fisherman Society.*

¹Mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya persoalan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam persektif. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, mengekspresikan masyarakat untuk memiliki hak berinovasi dan berkreasi (Prasetyo, 2012)

(Satmaidi, 2010) menjelaskan bahwa dengan diratifikasinya konvensi Hak oleh Indonesia Tahun 2005, kewajiban Indonesia untuk melakukan pemenuhan dan jaminan-jaminan ekonomi, sosial, dan budaya harus diwujudkan baik melalui aturan hukum ataupun melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Masyarakat pesisir khususnya nelayan di dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masih termarginalkan. Hak pada kenyataannya belum banyak dipahami. Pemerintah sendiri seringkali memandang hak lebih sebagai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya. Masyarakat nelayan masih belum tersentuh dengan upaya pemberdayaan dan pembinaan sumber daya manusia sehingga pendidikan, pemenuhan hak atas kehidupan yang layak, pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas perumahan, dan pemenuhan hak atas kesehatan masih lemah tanpa adanya intervensi dari pemerintah

sebagai regulator dan pemegang kewajiban tidak terkecuali dimasyarakat nelayan di Pantai Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

Permasalahan yang dialami terkait hak yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat nelayan sehingga ada yang hanya lulus sekolah dasar bahkan sampai ada yang tidak tamat sekolah dasar itu dari segi sumber daya manusia, belum dari segi keterbelakangan sosial dan kemiskinan.

Kondisi ini dialami nelayan Pasir Jambak Kota Padang tentunya sangat memprihatinkan, khususnya pendidikan dan kondisi rumah atau tempat tinggal. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan daratan akan dirasakan semakin sempit, maka mata pencaharian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan harapan dimasa depan. Untuk itu di masa depan masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut. Adanya putus sekolah bagi anak nelayan dikarenakan pengalihan kegiatan ekonomi ke laut membantu orang tua, sebab itu terjadi, maka generasi muda akan terabai.

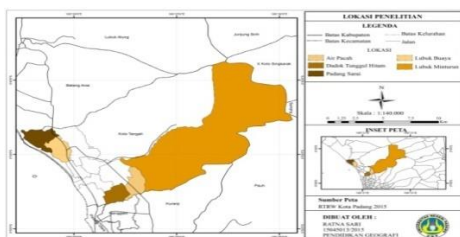
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Pasir Jambak di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan di penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdapat 14 orang informan, informan itu meliputi pemerintah kelurahan dan masyarakat nelayan.

Teknik pengolahan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data diperoleh dan didapat dilapangan, penyajian data dalam bentuk uraian singkat dari pembahasan yang didapatkan di lapangan, dan terakhir yaitu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1 . Peta Lokasi

1. Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Terkait Dengan Pemenuhan Terhadap Pendidikan

(a) Ketersediaan Lembaga

Ketersediaan lembaga pendidikan formal yang ada di nelayan Pasir Jambak Kota Padang masih terdapat kekurangan yaitu tingkat SMA. Lembaga pendidikan pun bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni

transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jenis pendidikan formalnya terdiri dari PAUD, SD,SMP. Sedangkan pendidikan non formal adalah berupa les privat atau bimbingan belajar yang dikelola oleh individu.

Pendidikan nelayan belum terpenuhi sampai 12 tahun. Artinya masyarakat nelayan tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Karena dipengaruhi oleh ekonomi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah. Disamping itu lembaga pendidikan disini tidak jauh dari pemukiman masyarakat, namun dari segi ekonomi lemah masyarakat tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan tingkat SMA.

Disisi lain jaminan sosial yang diberikan kepada anak atau siswa yang ada di Pasir Jambak mulai dari SD-SMA bantuan berupa kartu indonesia pintar (KIP) , namun untuk itu tidak mencukupi bagi anak yang menerima program pemerintah tersebut.

(b) Fasilitas Sekolah Yang Memadai

Fasilitas sekolah berpengaruh penting untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Banyaknya fasilitas di sekolah yang kurang memadai akan menghambat proses

belajar mengajar di sekolah. Banyak siswa yang tidak nyaman dikarenakan fasilitas yang kurang memadai semisal bangku yang rusak, atap sekolah yang bocor hal ini akan menghambat proses belajar mengajar. Namun sebaliknya apabila fasilitas sekolah memadai maka proses pembelajaran akan terasa nyaman.

Fasilitas lembaga pendidikan formal yang ada di tempat nelayan sudah memadai, namun dari fasilitas siswa dari keluarga masyarakat nelayan belum terpenuhi, tidak meratanya bantuan dari sekolah yang diberikan kepada masyarakat nelayan.

Fasilitas sekolah yang memadai mulai dari ruangan kelas, mushola, kantin, perpustakaan, lapangan, sehingga siswa lebih nyaman untuk belajar. Di Pasia Jambak hanya terdapat tiga SD, yaitu SDN 06 Pasir Jambak, SDN 23 Pasir Sebelah, SDN 31 Pasir Kandang dan SMPN 42 Padang. Namun dari fasilitas siswa dalam menempuh pendidikan bagi keluarga masyarakat nelayan belum terpenuhi, tidak meratanya bantuan jaminan sosial dari sekolah yang diberikan kepada masyarakat nelayan. Disamping itu terdapat pula polemik bagi siswa yang kurang fasilitas pembelajaran online, yang mana orang tua di tuntut untuk membeli paket internet untuk belajar online.

2. Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Terkait Dengan Pemenuhan Terhadap Perumahan Yang Layak Di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo

(a) Menghuni Rumah Yang Layak

Terus bertambahnya penduduk menjadi masalah akan adanya kebutuhan perumahan yang layak umumnya di Indonesia. Dan ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah terutama bagi masyarakat miskin akan pemenuhan rumah yang layak. Kenyataannya faktor lahan alias tanah untuk pembangunan perumahan yang belum tersedia menjadi sebab masalah dibarengi jumlah penduduk miskin yang semakin tinggi di Indonesia.

Hasil temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Equanti, (2014) bahwa pemenuhan hak ini sering sulit didapat bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah terbatasnya akses perumahan serta lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat.

Kondisi rumah nelayan masih belum layak dari kondisi fisik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat nelayan memiliki tingkat ekonomi mayoritas pada kondisi kekurangan. Adapun bahan dasar rumah nelayan adalah berbahan dasar kayu yang diselingi oleh batu.

Begitu juga untuk bantuan rumah masyarakat yang mana

masyarakat belum ada melakukan pengaduan kepada pemerintah kelurahan terkait dengan bantuan rumah. Namun dari segi jaminan sosial masyarakat nelayan sudah mendapatkan bantuan sembako yaitu berupa beras satu karung. Didukung oleh penelitian Sarapil, dkk (2019) menyatakan bahwa kondisi perumahan mereka ada yang terbuat dari beton dan ada juga yang terbuat dari kayu untuk yang tinggal di pesisir pantai.

Menghuni rumah yang layak bagi masyarakat nelayan di Pasia Nan Tigo masih belum dirasakan masyarakat nelayan. Rumah nelayan ini terletak di sepanjang pantai Pasia Nan Tigo dengan rentan panjangnya 4 KM pemukiman sederhana yang didiami oleh masyarakat nelayan yang terbuat dari kayu sebagian atau seluruh lantainya dari kayu atau semen atapnya bisa dari seng atau rumbia, ukuran rumahnya yang besar 8 x 12m dan kecil ukuran 4 x 6m persegi.

(b) Perumahan Yang Sehat

Salah satu diantara lingkungan yang selalu berinteraksi dengan manusia, karena kurang lebih separuh hidup manusia akan berada di rumah, sehingga kualitas rumah akan berdampak terhadap kondisi kesehatannya. Didukung dengan penelitian Suwita, (2019) bahwa perilaku manusia selain akan berdampak terhadap kesehatan juga dapat mempengaruhi kualitas

lingkungan. Rumah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan adalah faktor risiko dan sumber penularan penyakit.

Masyarakat di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo terdapat rumah yang belum memiliki WC, begitu halnya ada juga kebiasaan masyarakat yang membuang kotoran WC ke laut. Itu semua dilakukan karena tidak adanya WC di rumah masyarakat. Katagori rumah masyarakat nelayan di Pantai Pasir Jambak masih katagori belum sehat. Artinya perumahan masyarakat yang dihuni masih terdapat WC, saluran got, tempat buang sampah yang belum tersedia.

Ikawati, (2020) bahwa kawasan kumuh pada umumnya terdapat bangunan yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan semi permanen hingga non permanen walaupun ada beberapa bangunan yang masuk dalam kondisi permanen. Untuk itu pemerintah Kelurahan tidak tinggal diam dengan mencari solusi bagi masyarakat nelayan yang belum memiliki rumah permanen dan rumah yang kurang sehat, dengan cara memberikan bantuan melalui PT dan BAZNAS. Untuk kriteria masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan adalah memiliki surat kepemilikan rumah, bukan kontrakan atau sewa.

(c) Perumahan Yang Aman

Lingkungan pemukiman yang aman merupakan idaman setiap orang untuk mencapai kesejahteraan hidup

dan menjamin kesehatan keluarga. Tidak terkecuali nelayan yang ada di Pasia Jambak. Faktor penentu dari lingkungan pemukiman tersebut meliputi kondisi fisik rumah tinggal. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang aman di dalam lingkungan pemukiman bagi masyarakat nelayan yang guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjiwa diri, mandiri, dan produktif bagi setiap orang atau keluarga, telah ditetapkan menjadi visi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman.

Namun kenyataannya dari penelitian yang penulis temukan bahwa di nelayan Pasir Jambak terkait perumahan yang aman di daerah ini masih bisa dikatakan kurang aman. Artinya masih terdapat rumah masyarakat yang dekat di pinggir pantai, dan banjir apabila hujan lebat. Rata-rata rumah tersebut bentuknya semi permanen. Rumah semi permanen dibuat dengan tujuan agar tidak banyak memakan biaya dan begitu juga untuk mengurangi biaya apabila terjadi pasang naik dan banjir menghantam rumah. Begitu juga jarak dari bibir pantai ke rumah masyarakat nelayan tersebut kurang lebih 20 meter.

Perumahan masyarakat nelayan belum bisa dikatakan aman dari segi ombak pasang dan hujan lebat, karena rata-rata rumah masyarakat tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Begitu juga halnya rumah masyarakat nelayan yang terdapat di Pantai Pasir

Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo pada umumnya masih semi permanen. Disamping itu ada terdapat rumah nelayan yang rusak akibat air laut pasang yang membawa pasir kerumah warga dan ketika hujan jalan disekitar rumah masyarakat digenangi air dan tidak bisa dilalui.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Terkait Dengan Pemenuhan Terhadap Pendidikan

Dari segi ketersediaan lembaga pendidikan formal yang ada di Pasia Nan Tigo masih terdapat kekurangan yaitu tingkat SMA. Jenis lembaga pendidikan formal yang ada terdiri dari PAUD, SD, SMP. Sedangkan pendidikan non formal adalah berupa les privat atau bimbingan belajar yang dikelola oleh individu dan fasilitas sekolah sudah memadai mulai dari ruang kelas, mushola, kantin, perpustakaan, lapangan sehingga siswa lebih nyaman untuk belajar.

2. Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Terkait Dengan Pemenuhan Terhadap Perumahan Yang Layak

(a) Kondisi rumah masyarakat nelayan masih belum layak dari kondisi fisik. Karena rumah masyarakat nelayan dalam kondisi mengkhawatirkan, bahwa kondisi rumah masyarakat

nelayan tidak bisa dikatakan terpenuhi atas perumahan yang layak, masih terdapat mendiami rumah papan, kontrakan atau semi permanen dominan kayu bercampur batu bata dan beralasan semen.

- (b) Perumahan yang ada belum terpenuhi atas kelayakan rumah sehat. Artinya masih terdapat rumah masyarakat nelayan yang belum memiliki WC, masih memanfaatkan MCK, begitu juga halnya pembuangan saluran air yang masih tergenang di pinggir rumah dan ada juga kebiasaan masyarakat yang membuang kotoran WC ke laut. Itu semua dilakukan karena tidak adanya WC di rumah masyarakat, dan
- (c) Perumahan masyarakat nelayan belum aman. Artinya masih terdapat rumah masyarakat yang dekat di pinggir pantai, dan banjir apabila hujan lebat.

DAFTAR PUSTAKA

- Equanti, D. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2012*. Edukasi: Jurnal Pendidikan.
- Ikawati, D. 2020. *Analisis Kelayakan Investasi Perencanaan Perbaikan Perumahan Kumuh Menjadi Perumahan Sederhana Sehat (Studi Kasus: Perumahan Kumuh Pada Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)*. Doctorat Dissertation, Untag 1945 Surabaya.
- Sarapil, C. I., Tamarol, J., & Kumaseh, E. I. 2019. *Potret Masyarakat Nelayan Penangkap Ikan di Pulau Lipang Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Ilmiah Tindalung.
- Satmaidi Edra. 2010. *Problema Hukum Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Hutan*. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1
- Suwita, S., & Fahri, S. 2019. *Analisis Determinan Rumah Sehat Dalam Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan.
- Prasetyo Adi Yosep. 2012. *Hak Dan Kewajiban Negara. Makalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Holiday Resort Lombok.